

RPSEP-62

AKSES INFORMASI YANG AKURAT CEPAT MUDAH DAN MERATA MENDORONG TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK

Herwati Dwi Utami
Ilmu Administrasi FISIP UT
herwati@ut.ac.id

Abstrak

Semakin maju suatu negara/daerah, semakin tinggi tuntutan terhadap penyediaan data dan informasi yang akurat. Berdasarkan asumsi tersebut urgensi penyediaan data menjadi sejalan dengan dengan akselerasi pembangunan yang dilaksanakan suatu daerah. Di samping itu untuk keperluan perencanaan, data diperlukan untuk bahan dalam proses pembuatan keputusan yang efektif. Penyediaan data dan informasi oleh pemerintah, merupakan upaya yang ditempuh untuk mewujudkan akuntabilitas publik serta membangun citra pemerintah yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab. Manajemen data dan informasi dalam suatu pengelolaan basis data yang terintegrasi akan memudahkan berbagai pihak mengetahui potensi dan permasalahan di suatu daerah. Ketersediaan data dan informasi yang dimiliki oleh suatu institusi/pemerintahan akan sangat membantu proses pengambilan kebijakan yang menyangkut kepentingan bersama. Teknologi informasi dan komunikasi dalam layanan informasi publik pada batas tertentu menjadi salah satu kekuatan pemaksa perubahan paradigma dan cara pelayanan publik yang disediakan pemerintah/lembaga publik. Namun teknologi informasi dan komunikasi tidak bisa sepenuhnya menggantikan pelayanan dan proses pengambilan keputusan yang biasanya dilakukan oleh birokrat pelayanan publik. Teknologi informasi dan komunikasi hanya merupakan sarana bantu dalam pembuatan keputusan dan penyajian informasi kepada publik tentang berbagai aspek layanan.

Kata kunci: Akses Informasi, Layanan Publik, Teknologi Informasi

PENDAHULUAN

Informasi merupakan hal penting bagi kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, yang dapat diperoleh dengan cara konvensional hingga menggunakan peralatan komputer. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan

teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik. Informasi publik merupakan hak dasar yang mesti dipenuhi oleh lembaga publik untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Informasi ini apabila dikemas sedemikian rupa akan dapat mendukung berkembangnya partisipasi publik dan hubungan yang ideal antara masyarakat dengan aparatur pemerintah (Suprawoto,2008)

Hak untuk mengakses informasi adalah hak asasi manusia yang paling mendasar, seperti tercantum dalam Pasal 19 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pasal ini menjamin hak untuk “mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan”. Hak ini berlaku bagi setiap orang dengan tidak memandang batas-batas. Hak atas informasi memainkan peran yang sangat penting dalam penyebarluasan berbagai nilai-nilai sosial. Informasi adalah landasan utama bagi partisipasi yang bermakna, sekaligus piranti penting dalam peningkatan kesejahteraan sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 pada pasal satu menyebutkan kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan mengapa [negara](#) ini terbentuk. Kesejahteraan masyarakat akan berimbas pada politik, [hukum](#), ekonomi, dan sebagainya. Kesejahteraan masyarakat bisa diartikan sebagai pilar utama dalam bangunan yang bernama negara. Tanpa kesejahteraan masyarakat sebuah negara akan jalan di tempat.

Masalah dan tantangan di atas mengharuskan pemerintah mengubah paradigma dalam mewujudkan setiap kebijakan dengan mengutamakan pola-pola keberpihakan pada masyarakat. Melalui perwujudan *good governance*, di mana salah satu karakteristiknya adalah mendorong partisipasi dan kemitraan dengan masyarakat, maka pembangunan harus melibatkan masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat, tidak akan ada strategi yang mampu bertahan lama. Peran masyarakat madani harus dipandang sebagai hal yang dinamis dan memberikan suatu peluang bagi pemerintah yang bermaksud membangun negara. Demikian pula halnya akses informasi, yang merupakan faktor penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Keterlibatan dan peran berbagai kelompok/organisasi masyarakat dan swasta dalam penyaluran aspirasi masyarakat melalui mekanisme demokrasi telah menciptakan suatu momentum menuju suatu rasa memiliki dan berkehendak serta berkelanjutan bagi pelaksanaan kebijakan pengelolaan informasi dan perwujudan *good governance*.

Pentingnya Akses Informasi Bagi Masyarakat

Pembangunan teknologi informasi dan komunikasi merupakan sumber terbentuknya iklim yang menjadi landasan bagi tumbuhnya kreativitas sumberdaya manusia yang pada gilirannya dapat menjadi sumberdaya pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Oleh karena itu, teknologi informasi dan komunikasi merupakan faktor yang memberikan kontribusi sangat signifikan dalam peningkatan kualitas masyarakat melalui peranannya yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu bangsa.

Secara umum, peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam lingkup nasional mencakup fungsi-fungsi sebagai berikut (<http://www.ilmukomputer.org/wp-content/uploads/2006/10/ristek-bukuputihik.pdf>):

- a) Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- b) Meningkatkan daya saing bangsa.
- c) Memperkuat kesatuan dan persatuan nasional.
- d) Mewujudkan pemerintahan yang transparan.
- e) Meningkatkan jati diri bangsa di tingkat internasional.

Di semua negara, pemerintah adalah organisasi pengolah data yang terbesar. Dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, tugas pemerintah dalam pengumpulan, penyimpanan, perhitungan, analisis, dan penyebaran data dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat dan hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih cepat dan tepat sasaran. Teknologi informasi dan komunikasi dapat membuat pemerintah dan negara secara keseluruhan menjadi lebih produktif, lebih efektif, dan lebih efisien.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi juga memungkinkan untuk menghasilkan rekaman data yang lebih rapi dan dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Rekaman data semacam ini akan memudahkan pemantauan dan pemeriksaan. Dengan demikian akan memudahkan untuk menilai apakah pemerintah telah melaksanakan tugasnya dengan tepat dan cepat, sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Akuntabilitas dan transparansi akan dapat ditingkatkan sehingga memungkinkan untuk menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik. Dengan demikian, adalah sangat tepat apabila usaha-usaha peningkatan produktivitas, akuntabilitas dan transparansi pemerintah dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pemerintah Sebagai Penyedia Informasi dan Pengetahuan

Sebagai produsen dan pengguna informasi yang terbesar, pemerintah adalah pemilik informasi publik terbesar, yang memiliki kewenangan untuk mendistribusikan informasi tersebut kepada yang membutuhkan. Membuat informasi menjadi terjangkau adalah suatu bentuk layanan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, pelaku bisnis, dan unit organisasi pemerintah. Kebijakan pemerintah yang menyediakan akses langsung secara efisien terhadap informasi publik adalah merupakan unsur penentu dalam meningkatkan kemampuan inovasi semua elemen bangsa dan negara. Akses terhadap informasi tersebut secara efisien memerlukan bantuan teknologi informasi dan komunikasi.

Apa dan bagaimana mengatur akses informasi? Hal ini biasanya diasumsikan (McQuail dalam Burgelman, 2000) secara umum sebagai sistem komunikasi seimbang, melibatkan kebijakan yang efektif berkenaan dengan akses, harus menawarkan:

- Refleksi, seluruh sistem komunikasi keanekaragaman suatu masyarakat;
- kemungkinan bagi masyarakat sebuah negara untuk mengekspresikan nilai-nilai dan keyakinan;
- dan keragaman pilihan media informasi serta sistem secara keseluruhan (surat kabar, sistem perpustakaan, televisi dan sebagainya) harus ada dan tersedia.

Teknologi informasi dan komunikasi dapat dipergunakan untuk menyiapkan informasi publik dalam bentuk elektronik yang memungkinkan untuk dicari, dilihat, dan di-*download* oleh yang membutuhkannya melalui media komunikasi dan sistem informasi yang disiapkan untuk keperluan itu. Dalam sistem perekonomian global yang semakin intensif informasi seperti saat ini, fasilitas akses ke *database* dan dokumen yang tertata rapi sehingga menghasilkan pengetahuan atas kondisi dan potensi lokal (*local genius*) yang sangat khas dapat dijadikan unsur penting dalam peningkatan daya saing bangsa dan negara. Pengetahuan tersebut dibutuhkan oleh masyarakat dan pelaku bisnis untuk berinovasi dan berkreasi menghasilkan usaha-usaha baru yang sangat penting dan merupakan tumpuan pertumbuhan ekonomi (*knowledge based economy*).

O'Brien (1998:25-26) mengidentifikasi beberapa atribut kualitas informasi yang akan membuat informasi publik lebih bernilai dan bermanfaat bagi publik penggunaannya. Secara lengkap, O'Brien membuat karakteristik kualitas informasi seperti tabel berikut ini :

Tabel 1. Atribut Kualitas Informasi

Dimensi Waktu	
Tak Terbatas Waktu	Informasi harus disediakan ketika diperlukan
Terkini	Informasi harus termutakhirkan saat disediakan
Frekuensi	Informasi harus disediakan sesering mungkin
Periode waktu	Informasi dapat disediakan dalam situasi yang lalu, terkini dan waktu yang akan datang
Dimensi Isi	
Akurasi	Informasi harus bebas dari salah
Relevansi	Informasi harus terkait dengan kebutuhan publik
Kelengkapan	Semua informasi yang diperlukan harus disediakan
Singkat	Hanya informasi yang diperlukan yang harus disediakan
Dimensi bentuk	
Kejelasan	Informasi harus disediakan dalam bentuk yang mudah dimengerti
Detil	Informasi disediakan secara lengkap atau dalam bentuk ringkas
Urutan	Informasi dapat disusun dalam urutan yang jelas/tertentu
Tampilan	Informasi dapat disajikan dalam bentuk narasi, angka, grafis atau bentuk lain.
Media	Informasi dapat disediakan dalam bentuk dokumen tercetak, tampilan video atau media lain

Penyediaan data dan informasi oleh pemerintah merupakan upaya yang ditempuh untuk mewujudkan akuntabilitas publik serta membangun citra pemerintah yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab. Ketersediaan data dan informasi yang dimiliki oleh suatu institusi/pemerintah akan sangat membantu proses pengambilan kebijakan yang menyangkut kepentingan bersama.

Beberapa contoh dari Sistem Aplikasi Informasi Pemerintah yang sudah ada antara lain : SIMTAP merupakan kepanjangan dari Sistem Informasi Manajemen Satu Atap, yaitu sistem layanan yang mengintegrasikan beberapa layanan kepada masyarakat. Layanan-layanan yang terdapat dalam SIMTAP ini antara lain : Layanan IMB, Layanan Izin Lokasi, layanan Izin Gangguan , Layanan Izin Reklame, Layanan Surat Izin Usaha, Perdagangan (SIUP)

SIMPEG merupakan sistem informasi yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan kepegawaian di pemerintah daerah

SIMDUK merupakan sistem informasi manajemen kependudukan yang efektif dan efisien

Pemerintah Sebagai Penggerak Pemanfaatan Informasi

Pemerintah harus memetakan suatu gambaran kebijakan dan strategi untuk mengeksploitasi aset informasi miliknya serta mengembangkan infrastruktur informasi yang diperlukan untuk mempromosikan penggunaan aset informasi tersebut secara optimal. Di negara berkembang, peran pemerintah dalam mempromosikan pemanfaatan aset informasi oleh dunia usaha adalah sangat dominan dan penting. Dengan menyediakan prasarana yang terjangkau, memberikan insentif, bimbingan, bantuan teknis, operasional dan finansial kepada pelaku bisnis dalam kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) diharapkan dapat memberikan manfaat yang maksimal dari pengelolaan aset informasi. Harapannya, UMKM menjadi lebih inovatif dan produktif sehingga daya saingnya meningkat. Dengan demikian perekonomian nasional secara keseluruhan ikut terangkat.

Gerakan pemanfaatan informasi tersebut sangat tergantung pada ketersediaan produk-produk dan layanan-layanan teknologi. Dengan demikian akan mendorong munculnya kebutuhan akan produk-produk dan layanan teknologi informasi dan komunikasi. Seperti diuraikan di atas, kebutuhan tersebut sepatutnya dipasok oleh kemampuan dalam negeri supaya tidak menimbulkan ketergantungan yang lebih besar kepada negara lain. Tanpa dukungan kapasitas industri teknologi yang memadai, usaha pemanfaatan teknologi dan penggerakan UMKM akan sangat terbatas. Pengembangan kapasitas industri teknologi informasi dan komunikasi adalah usaha pendukung yang mutlak diperlukan untuk mengurangi keterbatasan tersebut. Untuk itu diperlukan promosi potensi negara sebagai suatu tempat yang subur bagi bersemainya industri teknologi seperti industri produk perangkat keras, industri perangkat lunak, industri layanan, industri dan penciptaan kandungan (*content*) teknologi. Pemerintah sebagai salah satu pembelanja produk, layanan, isi dan sistem teknologi informasi dan komunikasi terbesar dapat menekankan dan memprioritaskan penggunaan produk dan layanan lokal atau penyertaan perusahaan lokal dalam proyek-proyek pemerintah. Untuk itu rangsangan melakukan riset dan pengembangan yang ditujukan untuk menghasilkan produk dan layanan teknologi informasi dan komunikasi yang terjangkau adalah mutlak diperlukan.

Pemerintah sebagai Pemerata Informasi

Teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu alat yang membutuhkan kemampuan untuk memiliki dan menggunakannya. Tiap negara memiliki kemampuan yang berbeda untuk memiliki dan menggunakannya sehingga memunculkan kesenjangan digital (*digital divide*) yang membagi negara-negara di dunia menjadi kelompok negara yang kaya informasi (*information rich*) dan kelompok negara yang miskin informasi (*information poor*). Kemajuan dan sifat teknologinya serta harga perangkatnya menyebabkan tingkat perbedaan pemanfaatan teknologi untuk pemberdayaan informasi antar negara makin lama makin mengecil. Kekuatan intelektual dan komitmen pemerintah merupakan bekal yang lebih menentukan kemampuan suatu negara untuk memperkecil kesenjangan digitalnya dengan negara lain. Di dalam negeri sendiri, masyarakat atau badan usaha memiliki kemampuan yang sama dalam memanfaatkan teknologi untuk memberdayakan informasi. Dengan demikian kesenjangan digital di dalam negeri menjadi lebih penting untuk diperhatikan apabila pemerintah berniat memanfaatkan teknologi dalam pemberdayaan informasi untuk menggerakkan perekonomian. Akan muncul kelompok yang diuntungkan karena memiliki kemampuan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih tinggi dari kelompok lain.

Kemampuan teknologi informasi dan komunikasi ini mencakup kemampuan teknis untuk mengoperasikan peralatan teknologi informasi dengan mahir dalam berkomunikasi dengan sumber layanan informasi dan kemampuan finansial dalam penyediaan peralatan teknologi dan membayar biaya pengoperasiannya. Teknologi informasi dan komunikasi sebagai suatu alat perlu direncanakan dengan menjanjikan kemudahan pemanfaatannya bagi semua warga negara dan badan usaha dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang sangat bervariasi. Dengan demikian diperlukan suatu rencana pengembangan teknologi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dengan keterbatasan finansial dan teknis. Perlu disiapkan fasilitas penghubung teknologi informasi dan komunikasi lengkap dengan personalnya untuk dapat mengeliminasi faktor penyebab terjadinya kesenjangan digital tersebut dalam jangka pendek. Perlu disiapkan teknologi supaya informasi yang dibutuhkan warga dan badan usaha kelas UMKM dapat didorong ke mereka secara teratur sehingga mereka bisa mendapatkannya tanpa harus mencari. Kebutuhan akan produk dan layanan teknologi semacam ini perlu direncanakan untuk dipenuhi oleh potensi dalam negeri melalui program-program riset dan pengembangan yang disusun secara terencana dalam tahapan-tahapan yang berkelanjutan. Disamping itu

kebutuhan infrastruktur yang menjangkau semua tempat di Indonesia dengan biaya investasi dan pengoperasian yang terjangkau adalah program riset dan pengembangan yang mutlak diperlukan.

Pemerintah Sebagai Penyedia Akses dan Mengorganisir Informasi

Teknologi informasi dan komunikasi adalah teknologi yang memiliki kemampuan menakjubkan dalam mengorganisir data, informasi dan pengetahuan dalam jumlah besar secara cepat dan aman. Data yang telah diorganisir ini dapat diakses juga secara cepat dan aman. Data yang dikumpulkan dapat disebarkan kepada semua yang membutuhkan dengan menyediakan kemampuan akses yang cepat dan aman ke pusat-pusat data, informasi, dan pengetahuan yang telah tersedia sebagai hasil dari pengorganisasian data, informasi dan pengetahuan yang telah dilakukan dengan bantuan teknologi. Dengan memanfaatkan peran fundamental teknologi informasi dan komunikasi ini secara optimal akan sangat membantu dalam mempercepat pembelajaran, inovasi, serta penciptaan dan penyebaran pengetahuan kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha. Pembelajaran, inovasi, serta penciptaan pengetahuan adalah unsur-unsur pokok yang sangat dibutuhkan bagi peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa.

Pentingnya Literasi Informasi Bagi Masyarakat

Teknologi Informasi dan komunikasi tidak akan berpengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat apabila tidak diimbangi dengan literasi informasi. Banyak definisi tentang literasi informasi/melek informasi yang terus berkembang saat ini. Namun pada hakekatnya literasi informasi adalah seperangkat ketrampilan yang diperlukan untuk mencari, menelusur, menganalisa dan memanfaatkan informasi (Bundy, 2001).

Literasi informasi merupakan proses pembelajaran seumur hidup yang akan menjadi bekal seseorang dalam mencari informasi, bukan hanya dalam pendidikan. seseorang yang memiliki kemampuan informasi memiliki pemahaman terhadap : (1) kebutuhan informasi, (2) sumber referensi yang tersedia, (3) bagaimana mendapatkan informasi, (3) bagaimana mengolah informasi, (4) bagaimana mengomunikasikan informasi/ hasil temuan orang lain, (5) bagaimana menyimpan informasi (Septiyantono, 2014)

Literasi dibutuhkan untuk menemukan informasi yang dibutuhkan dan menyaring informasi yang bermanfaat. Tujuan literasi adalah untuk memanfaatkan informasi dengan tepat dan bermanfaat, kemampuan ini sangat penting ditengah terpaan arus informasi yang ada saat ini, dimana banyak sekali informasi dan seringkali kita kesulitan untuk menemukan informasi

yang diinginkan. Dengan literasi informasi seseorang akan mudah dalam mencari informasi, melalui media audio visual maupun yang lain. Oleh sebab itu ketrampilan ini perlu diberikan kepada masyarakat.

PENUTUP

Ketersediaan data dan informasi yang dimiliki oleh suatu institusi/pemerintahan akan sangat membantu proses pengambilan kebijakan yang menyangkut kepentingan bersama. Teknologi informasi dan komunikasi dalam layanan informasi publik pada batas tertentu menjadi salah satu kekuatan pemaksa perubahan paradigma dan cara pelayanan publik yang disediakan pemerintah/lembaga publik. Namun teknologi informasi dan komunikasi tidak bisa sepenuhnya menggantikan pelayanan dan proses pengambilan keputusan yang biasanya dilakukan oleh birokrat pelayanan publik. Teknologi informasi dan komunikasi hanya merupakan sarana bantu dalam pembuatan keputusan dan penyajian informasi kepada publik tentang berbagai aspek layanan.

Hak untuk mengakses informasi adalah hak asasi manusia yang paling mendasar. Informasi adalah landasan utama bagi partisipasi yang bermakna, sekaligus piranti penting dalam peningkatan kesejahteraan sosial. Pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan saat ini masih terlalu terpusat di Pulau Jawa dan Bali, sedangkan pertumbuhan kota-kota menengah dan kecil, terutama di luar pulau Jawa, berjalan lambat dan tertinggal sehingga kemampuan masyarakat untuk mengakses informasi menjadi terbatas.

Pembangunan teknologi informasi dan komunikasi merupakan sumber terbentuknya iklim yang menjadi landasan bagi tumbuhnya kreativitas sumberdaya manusia yang pada gilirannya dapat menjadi sumberdaya pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Oleh karena itu, teknologi informasi dan komunikasi merupakan faktor yang memberikan kontribusi sangat signifikan dalam peningkatan kualitas masyarakat melalui peranannya yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu bangsa.

Pembangunan teknologi informasi dan komunikasi yang merata di seluruh pelosok Indonesia adalah penting karena merupakan sumber terbentuknya iklim bagi tumbuhnya kreativitas sumberdaya manusia yang pada gilirannya dapat menjadi sumberdaya pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Oleh karena itu, teknologi informasi dan komunikasi merupakan faktor yang memberikan kontribusi sangat signifikan dalam peningkatan kualitas masyarakat melalui

peranannya dalam pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Memanfaatkan peran teknologi informasi dan komunikasi ini secara optimal akan sangat membantu dalam mempercepat pembelajaran, inovasi, serta penciptaan dan penyebaran pengetahuan kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha. Oleh karena itu diperlukan kebijakan untuk mengatur hak masyarakat untuk mengakses informasi demi terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai produsen dan pengguna informasi yang terbesar, pemerintah adalah pemilik informasi publik terbesar, yang memiliki kewenangan untuk mendistribusikan informasi tersebut kepada yang membutuhkan. Membuat informasi menjadi terjangkau adalah suatu bentuk layanan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, pelaku bisnis, dan unit organisasi pemerintah. Kebijakan pemerintah yang menyediakan akses langsung secara efisien terhadap informasi publik adalah merupakan unsur penentu dalam meningkatkan kemampuan inovasi semua elemen bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Burgelman, Jean-Claude. 2000. "Regulating access in the information society: The need for rethinking public and universal service". *New Media & Society*. London: Sage.

Gunawan, Agustin Wydia. 2008. *Tujuh Langkah Literasi Informasi: knowledge management*. Jakarta: Universitas Atma Jaya.

Meninjau konsep kesenjangan kesejahteraan: pola kesejahteraan antardaerah. http://bappeda.jabarprov.go.id/docs/perencanaan/20070620_065405.pdf. Tanggal akses 2 Oktober 2014.

Program warga madani: Program Pemberdayaan Masyarakat. <http://www1.menlh.go.id/i/Warga%20Madani.pdf>. Tanggal akses 2 Oktober 2014.

Septiyantono, Tri (2014). *Literasi informasi : buku materi pokok*. Jakarta : Universitas Terbuka

Ibid. Menyambut RUU Kesejahteraan Sosial : Pendapat dan Masukan. Disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Panitia Ad Hoc III DPD RI. Jakarta: 2008.

Uddin, Mohammad Nasir, Mohammed Quaddus, Md Shamsul Islam. Socio-economic-cultural aspects and mass information need: the case of public library uses in Bangladesh. *Library Management*. Vol. 27 No. 9. 2006.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia>. (2010, Desember 18). Diakses September 12 September, 2014, from <http://id.wikipedia.org>.

<http://www.ilmukomputer.org/wp-content/uploads/2006/10/ristek-bukuputihtik.pdf>.

(n.d.). Retrieved Desember 8, 2010, from <http://www.ilmukomputer.org>.

<http://www.p2kp.org/aboutdetil.asp?mid=1&catid=5&>. (n.d.). Retrieved Desember 12, 2012, from <http://www.p2kp.org>.

<http://www.cilip.org.uk/get-involved/advocacy/learning/information-literacy/pages/definition.aspx>. (2010). Retrieved November 25, 2012, from <http://www.cilip.org.uk>.

Indonesia, A. P. (n.d.).

<http://www.apjii.or.id/DOC/Laporan/Laporan%20Tahunan%202006%20-%202007%20revisi.pdf>. Retrieved Desember 8, 2012, from <http://www.apjii.or.id>.